

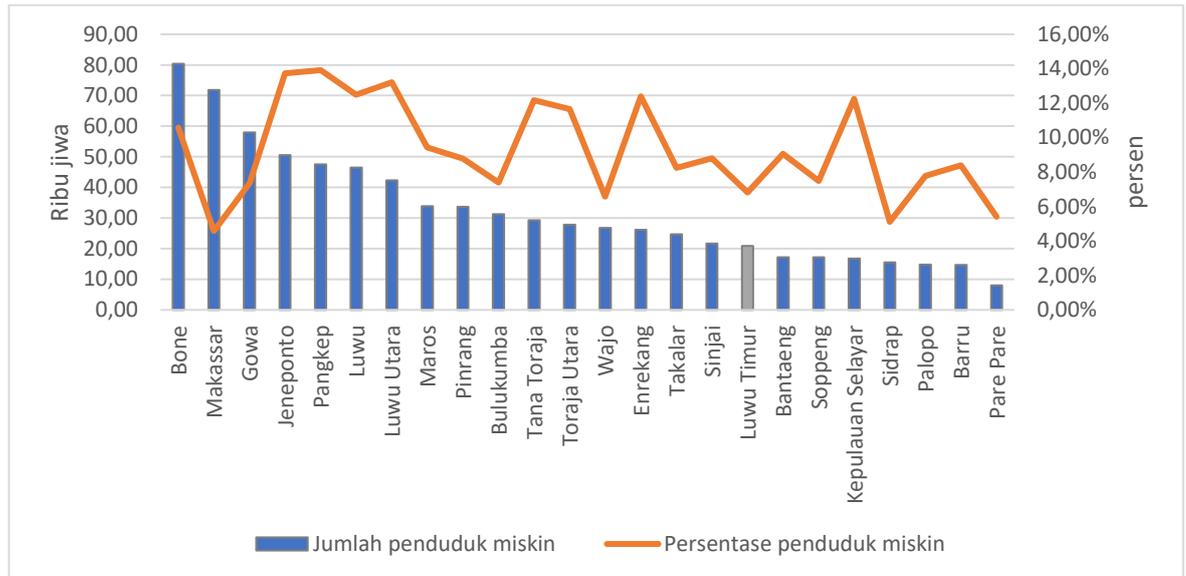
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

kemiskinan masih menjadi masalah krusial yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia termasuk Indonesia, dimana kemiskinan menjadi masalah yang multidimensional yang tidak hanya menjadi masalah ekonomi namun mencakup masalah politik, sosial, kesehatan dan aspek lainnya. Salah satu tujuan nasional yaitu menurunkan kemiskinan melalui peningkatan kinerja ekonomi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan standar hidup bagi seluruh penduduk Indonesia, yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengusulkan berbagai solusi untuk turut menangani masalah kemiskinan. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui keikutsertaan dalam merumuskan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yang terdiri dari 17 tujuan dengan 169 target yang menjadi pedoman untuk melaksanakan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat global hingga tahun 2030.

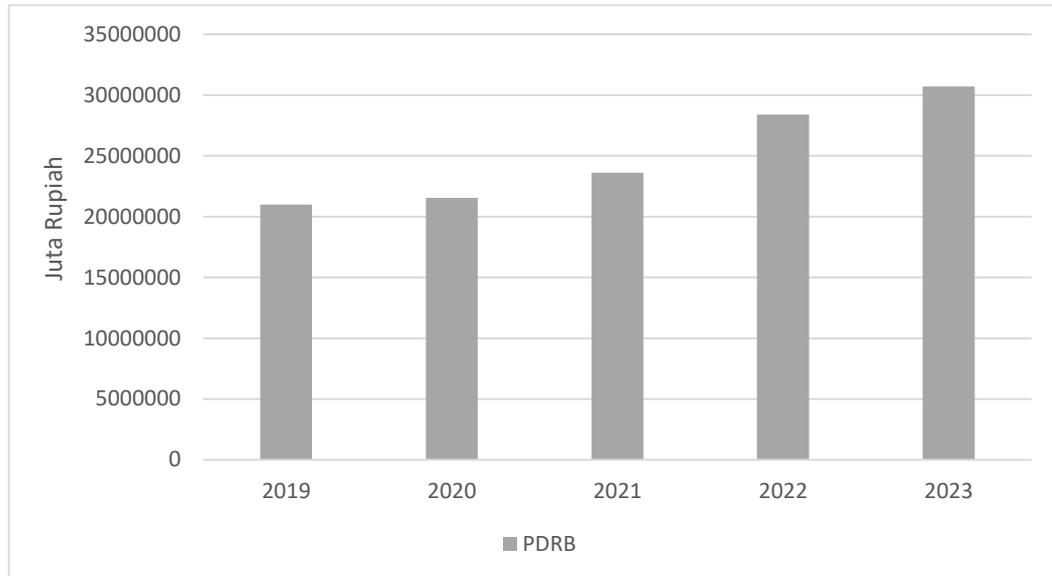
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). GKM merupakan pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan minuman dengan 2100 kilo kalori per hari. Sedangkan GKNM adalah minimal pengeluaran untuk tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2021-2023

Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2023

Berdasarkan data jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan yang mempunyai 24 Kabupaten/kota, menunjukkan kemiskinan yang cenderung beragam. Kabupaten Bone menunjukkan jumlah penduduk miskin tertinggi 80,34 ribu penduduk dengan persentase sebesar 10,58%. Di sisi lain, Kota Pare-pare menampilkan jumlah penduduk miskin terendah, hanya 7,98 ribu orang, dengan persentase kemiskinan 5,41%. Sementara itu, Kabupaten Sidrap, Palopo, dan Barru, meskipun memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan Bone, tetap menunjukkan angka kemiskinan yang signifikan, dengan persentase berkisar antara 5,14% hingga 8,14%. Sedangkan Kabupaten Luwu Timur menunjukkan kemiskinan mencapai 21,57 ribu penduduk dengan persentase 6,93% dari total penduduk luwu timur pada tahun 2023 sebanyak 308,53 ribu jiwa.



Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur 2019-2023

Gambar 1. 2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023

Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah yang dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, khususnya nikel yang memiliki potensi yang besar. Selama periode 2014 hingga 2018, Kabupaten Luwu Timur menjadi salah satu wilayah dengan kontribusi PDRB per kapita terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan, mencapai rata-rata sebesar 68,70 juta per tahun. Dan juga pada tahun 2018, pendapatan perkapita Kabupaten Luwu Timur mencapai 71,22 juta per tahun yang melampaui PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 52,85 juta atau US\$ 3.711,76.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor pertambangan menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Luwu Timur, diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Komoditas nikel sebagai salah satu hasil tambang unggulan, juga menyumbang ekspor terbesar mencapai US\$784,45 juta pada tahun 2019. Bahkan pada triwulan I tahun 2023, Luwu Timur tetap menjadi kontributor utama ekspor luar negeri komunitas nikel matte, yang mendominasi nilai ekspor nonmigas Provinsi Sulawesi Selatan

dengan pangsa mencapai 55,10%. Selain nikel matte, besi dan baja, serta biji-bijian berminyak dan obat (termasuk rumput laut), juga turut andil dengan pangsa masing-masing sebesar 17,09% dan 9,79%.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2021-2023

Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu Timur tahun 2019-2023

Gambar 1.3 menunjukkan data terkait penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2019 hingga 2023. Dari data tersebut dapat diketahui persentase penduduk miskin berfluktuasi di sekitar angka 6,8% hingga 6,9%, menunjukkan stabilitas relatif dalam proporsi penduduk miskin selama lima tahun ini. Namun, terdapat kenaikan dalam jumlah penduduk miskin dari 20,83 ribu orang pada tahun 2019 menjadi 21,57 ribu orang pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa meskipun persentasenya relatif stabil, jumlah absolut penduduk miskin menunjukkan peningkatan, yang mungkin disebabkan oleh pertumbuhan populasi atau faktor-faktor lain.

PDRB dan kemiskinan memiliki hubungan yang kompleks. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya melalui Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB), dimana dari data BPS Kabupaten Luwu Timur menunjukkan pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya mengalami peningkatan. Menurut teori *trickle down effect*, pertumbuhan inklusif yang menyebut adanya aliran menetas ke bawah, dari kelompok kaya ke kelompok miskin melalui mekanisme ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan kapasitas ekonomi dan menaikkan pendapatan per kapita. Dengan meningkatnya pendapatan per kapita, jumlah penduduk miskin pun seharusnya berkurang (Hajiji, 2010). Namun, teori ini juga menekankan bahwa peningkatan PDRB tidak secara otomatis mengurangi kemiskinan. Untuk mengurangi kemiskinan secara efektif, pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan distribusi manfaat yang merata. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang inklusif sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. PDRB di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Namun disisi lain, data kemiskinan menunjukkan fluktuasi yang berbeda tiap tahunnya, dimana jumlah penduduk miskin masih tidak menunjukkan penurunan yang konsisten seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur.

Kemiskinan erat kaitannya dengan kondisi rumah tangga miskin, dimana rumah tangga miskin ditandai dengan status pengeluaran dibawah garis kemiskinan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas hidup dan terbatasnya akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dan sanitasi. Pada tahun 2023 garis kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 399,755,-kapita/bulan, angka ini menjadi acuan untuk menentukan apakah suatu rumah tangga dapat dikategorikan sebagai miskin atau tidak miskin.

Karakteristik dari rumah tangga dan individu merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan, dimana karakteristik tersebut meliputi aspek demografi, ekonomi dan sosial (Haughton & Khandker, 2012). Aspek demografi seperti umur kepala rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga dan jumlah anggota rumah tangga dapat mempengaruhi kemiskinan. Umur kepala rumah tangga dapat menentukan kemampuan kerja dan pendapatan, dimana penelitian yang dilakukan Bokosi (2007) menunjukkan penambahan umur dari KRT berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Menurut moghadam (2005) perempuan rentan terhadap kemiskinan karena mereka sering mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak, upah yang diterima cenderung rendah, dan tingkat pendidikan yang kurang memadai dan tingginya buta huruf. Khususnya, perempuan yang menjadi kepala keluarga menghadapi beban yang lebih berat dan risiko kemiskinan yang lebih tinggi karena beban yang harus ditanggungnya dibandingkan dengan perempuan lainnya. Selain itu, jumlah anggota keluarga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur. Pada tahun 2023 di kabupaten Luwu Timur terdapat 73,079 rumah tangga dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga berjumlah 4 orang. Dimana dengan meningkatnya jumlah anggota rumah tangga, pengeluaran juga akan meningkat, sementara pendapatan atau penghasilan cenderung lebih rendah. Kondisi ini dapat menyebabkan kemiskinan karena pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat seiring dengan jumlah anggota keluarga yang lebih banyak.

Aspek ekonomi dalam penelitian ini meliputi pekerjaan kepala rumah tangga dan juga kepemilikan tabungan. Dari seluruh penduduk bekerja di kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023, jenis pekerjaan utama yang terbanyak sebagai buruh/karyawan/pegawai (35,76 persen) disusul jenis berusaha sendiri dibantu

buruh tidak tetap (25,04 persen). Dari data BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan sebanyak 67.244 jiwa atau 43,59% dan penduduk yang bekerja di industri pengolahan sebanyak 29.350 jiwa. Luwu Timur yang dikenal dengan pertambangan nikelnya, justru dari data BPS menunjukkan yang bekerja di sektor ini sebanyak 0,33% atau 509 penduduk dari 154.240 jumlah penduduk bekerja di kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023. Selain itu, kepemilikan tabungan seringkali menjadi simbol harapan dalam mengatasi kemiskinan. Haughton & Khandker (2012) menyatakan bahwa aset keuangan, termasuk aset likuid, tabungan dan aset keuangan lainnya, memiliki peran penting dalam mempengaruhi aliran pendapatan rumah tangga. Tabungan yang dikelola dengan baik oleh kepala rumah tangga dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi kemiskinan, karena tabungan berfungsi sebagai penyangga terhadap kelanjutan finansial yang tidak terduga serta memungkinkan investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan dan usaha kecil.

Karakteristik rumah tangga dari aspek sosial pada penelitian ini yaitu pendidikan kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga dengan pendidikan yang tinggi lebih baik dalam posisi untuk memperoleh pekerjaan yang layak di sektor formal. Dari data BPS, rata-rata lama sekolah dari penduduk luwu timur pada tahun 2020 adalah 8,2 tahun, hal ini akan mempengaruhi kemampuan rumah tangga dalam menghadapi situasi darurat dan meningkatkan pendapatan. Geddick (2010) mengemukakan bahwa pendidikan signifikan dan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Luwu Timur"

1.2 Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Umur Kepala Rumah Tangga terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Luwu Timur?
2. Apakah terdapat pengaruh Pendidikan Kepala Rumah Tangga terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Luwu Timur?
3. Apakah terdapat perbedaan pengaruh Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Luwu Timur?
4. Apakah terdapat pengaruh Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Luwu Timur?
5. Apakah terdapat pengaruh Jumlah Anggota Rumah Tangga terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Luwu Timur?
6. Apakah terdapat perbedaan pengaruh kepemilikan tabungan terhadap status kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh Umur Kepala Rumah Tangga terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Luwu Timur
2. Untuk menganalisis pengaruh Pendidikan Kepala Rumah Tangga terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Luwu Timur

3. Untuk menganalisis perbedaan pengaruh Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Luwu Timur
4. Untuk menganalisis pengaruh Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Luwu Timur
5. Untuk menganalisis Jumlah Anggota Rumah Tangga terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Luwu Timur
6. Untuk menganalisis perbedaan pengaruh kepemilikan tabungan terhadap status kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Luwu Timur
2. Menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam menanggulangi masalah kemiskinan di skala rumah tangga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi dimana individu atau suatu kelompok masyarakat mengalami keterbatasan finansial untuk memenuhi kebutuhan esensial, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Terjadinya kemiskinan dapat disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan pokok, selain itu dapat juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial dan pendidikan.

Suparlan (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi kekurangan harta dan benda berharga yang dialami oleh individu atau kelompok masyarakat yang hidup dalam lingkungan penuh kekurangan ekonomi atau kekurangan sumber daya, baik dalam hal keuangan, pengetahuan, kekuasaan politik, hukum maupun akses terhadap pelayanan umum, peluang usaha dan kesempatan kerja. Lebih lanjut, kemiskinan mengindikasikan suatu situasi dimana seseorang atau kelompok tidak memiliki kapasitas, kebebasan, aset dan aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka yang rentan terhadap risiko dan tekanan yang disebabkan oleh penyakit serta kenaikan mendadak harga bahan makanan dan biaya pendidikan (UNCHS, 1996; Panji, 2001)

Menurut Friedman (1992), kemiskinan timbul sebagai akibat dari ketidaksetaraan kesempatan dalam mengakumulasi kekuatan sosial. Gambaran kemiskinan dapat terlihat melalui berbagai indikator seperti

kelaparan, kekurangan tempat berteduh, kesulitan mendapatkan pengobatan medis, keterbatasan akses pendidikan, buta huruf, pengangguran, kekhawatiran akan masa depan bahkan kehidupan sehari-hari. Kemiskinan yang multidimensional mencakup keseluruhan indikator kesejahteraan yang dapat berubah dari waktu ke waktu maupun dari satu tempat ke tempat lainnya.

Menurut Sumedi dan Supadi (2004), masyarakat yang berada dalam kondisi miskin memiliki sejumlah karakteristik yang meliputi 1) kurangnya akses dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan mereka, 2) terbelakang dari institusi utama dalam masyarakat, 3) rendahnya kualitas sumber daya manusia yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan dan keterampilan yang berdampak pada rendahnya Status penghasilan, 4) terjebak dalam budaya rendahnya kualitas SDM, seperti rendahnya etos kerja, berpikir pendek dan fatalisme, 5) kepemilikan aset fisik yang rendah termasuk aset lingkungan hidup berupa air bersih dan penerangan.

Menurut Ellis (1984), konsep awal dalam menentukan kemiskinan terkait dengan kesejahteraan, dimana keadaan miskin merujuk pada kekurangan kesejahteraan. Kesejahteraan tersebut mencakup tiga hal utama, yakni taraf hidup, ketersediaan sumber daya dan akses terhadap kekuasaan.

2.1.2 Indikator Kemiskinan

Menurut BPS, kemiskinan merupakan kondisi yang penuh kekurangan, dialami oleh individu yang pengeluaran per kapita selama sebulan tidak mencukupi untuk memenuhi standar minimum kehidupan.

Standar minimum ini tergambar dalam garis kemiskinan (GK), yang menunjukkan batas pengeluaran per kapita perbulan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum, baik dalam hal makanan maupun non-makanan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) mencakup kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per orang tiap harinya. Sementara itu, Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) berupa kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di pedesaan.

World Bank menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita, dengan mengategorikan penduduk yang memiliki pendapatan per kapita kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan per kapita nasional sebagai golongan miskin. Dalam hal ini, world bank menetapkan ukuran kemiskinan sebesar USD \$2 per orang per hari. Penentuan ukuran kemiskinan ini dipertimbangkan berdasarkan norma pilihan, dimana norma ini menjadi sangat signifikan terutama dalam konteks pengukuran yang berbasis konsumsi (*consumption-based poverty line*). Pendapat yang sama dikemukakan oleh Kuncoro (1997) dimana ia menjelaskan bahwa kemiskinan yang berfokus pada konsumsi terdiri dari dua elemen utama, yaitu 1) pengeluaran yang dibutuhkan untuk mencukupi standar gizi minimum dan kebutuhan dasar lainnya. 2) jumlah kebutuhan yang sangat bervariasi, mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari.

Pada awal tahun 1970-an Sajogyo (dalam Seldayo dkk, 2003), menggunakan status konsumsi ekuivalen beras per kapita sebagai indikator

kemiskinan. Di daerah pedesaan, ekuivalen konsumsi beras adalah 240 kg per orang per tahun, sementara di daerah perkotaan sebesar 350 kg beras per orang per tahun. Penduduk yang mengkonsumsi di bawah nilai ekuivalen dikategorikan sebagai miskin. Selain Sayogyo, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga melakukan perhitungan dengan pendekatan non-moneter lainnya. BKKBN menggunakan 21 indikator untuk menggolongkan keluarga dalam 5 kategori, yaitu keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera, keluarga sejahtera I, Keluarga sejahtera II, Keluarga sejahtera III dan keluarga sejahtera III plus. Keluarga miskin menurut BKKBN adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih dari enam indikator penentu kemiskinan, diantaranya meliputi pola makan, kepemilikan pakaian, kepemilikan rumah, konsumsi daging/ikan/telur, kepemilikan pakaian baru dan luas lantai rumah per penghuni rumah.

2.1.3 Klasifikasi Kemiskinan

Djojohadikusumo (1995) mengidentifikasi empat pola kemiskinan. Pertama adalah *persistent poverty* yang merujuk pada kemiskinan yang bersifat kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah *cyclical poverty* yang mengindikasikan kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara menyeluruh. Pola yang ketiga yaitu *seasonal poverty* yang merupakan kemiskinan musiman seperti yang sering terjadi pada nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat yaitu *accidental poverty* yang merujuk pada kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam atau dampak dari kebijakan tertentu yang mengakibatkan penurunan status kesejahteraan suatu masyarakat.

Kuncoro (2003) mengidentifikasi kemiskinan dalam dua aspek, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merujuk pada kondisi dimana penduduk hidup di bawah garis kemiskinan atau pendapatan di bawah suatu ambang batas kemiskinan, yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti pangan, sandang, kesehatan, tempat tinggal dan pendidikan. Sementara itu, kemiskinan relatif berkaitan dengan bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh setiap golongan pendapatan atau erat kaitannya dengan distribusi pendapatan.

Selain itu, terdapat juga bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan. Bentuk-bentuk mencakup dari (1) Kemiskinan natural, (2) Kemiskinan kultural dan (3) kemiskinan struktural (Kartasasmita, 1996; Sumodiningrat, 1998; dan baswir, 1997)

1. Kemiskinan natural merupakan keadaan ketidakmampuan ekonomi yang sedari awal memang sudah miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena kekurangan sumber daya yang mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya pembangunan. Baswir (1997) menjelaskan bahwa kemiskinan natural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti cacat, penyakit, umur lanjut atau bencana alam.
2. Kemiskinan kultural merujuk pada sikap hidup yang bisa saja dipengaruhi oleh gaya hidup, kebiasaan maupun budaya dimana mereka dalam kecukupan dan tidak mengalami kekurangan. Kelompok masyarakat ini cenderung tidak mudah terlibat dalam pembangunan, tidak berusaha untuk meningkatkan dan mengubah taraf hidup, dimana

mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Baswir (1997) yang mengatakan kemiskinan kultural disebabkan oleh faktor budaya seperti malas, kurang disiplin, boros dan sebagainya.

3. Kemiskinan struktural merujuk pada kemiskinan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi tidak merata dari aset produksi, tindakan korupsi dan kolusi, serta tatanan ekonomi yang memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu (Baswir, 1997). Sumodiningrat (1998) mengemukakan bahwa munculnya kemiskinan struktural akibat upaya untuk mengatasi kemiskinan natural dengan membuat berbagai program dan kebijakan. Akan tetapi pada pelaksanaan program atau kebijakan tersebut yang tidak merata, kepemilikan sumber daya menjadi tidak seimbang, dan kesempatan yang tidak setara mengakibatkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata, sehingga menciptakan struktur masyarakat yang tidak seimbang. Kartasasmita (1996) menyebut kondisi ini sebagai *accidental poverty* yaitu kemiskinan yang timbul akibat dari dampak kebijakan tertentu yang mengakibatkan penurunan status kesejahteraan masyarakat.

2.1.4 Kemiskinan Rumah Tangga

Kemiskinan dapat dilihat dari persepsi makro dan mikro. Pada konteks makro, kemiskinan dinilai secara agregat dan melibatkan aspek luas, sementara pendekatan mikro diperlukan untuk memahami kondisi kemiskinan secara lebih rinci, seperti siapa yang mengalami kemiskinan dan karakteristik mereka secara spesifik. Pendekatan pada rumah tangga

adalah salah satu contoh pendekatan mikro. Menurut Anderson, dkk (2006), menganalisis rumah tangga sebagai unit analisis menjadi relevan, terutama dalam konteks negara sedang berkembang.

Pandangan mengenai kemiskinan berkaitan dengan kemampuan dari individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok baik itu digunakan untuk makanan maupun dalam hal non-makanan. Seseorang atau rumah tangga dikategorikan miskin bila menghadapi kondisi kekurangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Batas dari kebutuhan dasar minimum dinyatakan dengan menggunakan ukuran garis kemiskinan yang disetarakan dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan. Menurut Faturochman (1994), ada tiga alasan untuk melakukan penelitian terhadap rumah tangga miskin dan bukan individu. Pertama, kemiskinan itu sendiri mencerminkan keadaan dari suatu rumah tangga. Kedua, penggunaan data-data rumah tangga miskin maka akan lebih efektif untuk melakukan intervensi terhadap rumah tangga miskin dibanding intervensi terhadap kemiskinan individu, dimana akan cenderung mengarah pada pemahaman bahwa individu sebagai penyebab kemiskinannya. Ketiga, penggunaan data dari rumah tangga miskin cenderung lebih mudah dikembangkan dibanding dengan data-data individu miskin.

Haughton dan Khandker (2012) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang paling signifikan atau yang paling erat kaitannya dengan kemiskinan melibatkan tiga karakteristik, yakni karakteristik wilayah, karakteristik masyarakat dan karakteristik rumah tangga dan individu. Karakteristik dari wilayah mencakup hal-hal yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir atau angin topan maupun lokasi yang terpencil.

Sementara itu, karakteristik masyarakat mencakup elemen-elemen seperti ketersediaan infrastruktur (jalan, air) dan pelayanan (kesehatan, pendidikan) dan hubungan sosial. Kemudian karakteristik rumah tangga dan individu diamati melalui perspektif demografi seperti jumlah anggota rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, Umur kepala rumah tangga, rasio ketergantungan, lokasi rumah tangga dan gender kepala rumah tangga. Aspek ekonomi meliputi status pekerjaan, jam kerja, status pekerjaan, harta benda, tabungan, dan aspek sosial meliputi status kesehatan, pendidikan maupun tempat tinggal.

Ukuran dan struktur menjadi faktor yang dapat menunjukkan korelasi yang signifikan antara kemiskinan dengan susunan rumah tangga, seperti yang dikemukakan oleh Haughton dan Khandker (2012). Perbedaan antara rumah tangga miskin dan yang tidak miskin biasanya tercermin dalam karakteristik rumah tangga, seperti jumlah anggota rumah tangga dan karakteristik rumah tangga seperti Umur.

2.1.5 Teori Usia

Menurut Lasut (2017), usia seseorang dihitung sejak kelahiran hingga mencapai ulang tahun. Semakin bertambah usia, tingkat kedewasaan, dan kekuatan seseorang akan meningkat sehingga kemampuannya untuk berpikir dan bekerja menjadi lebih matang. Dalam pandangan masyarakat, individu yang dewasa cenderung lebih dipercaya hal tersebut didasarkan pada pengalaman hidup dan kematangan emosional yang lebih besar.

Usia kepala rumah tangga berpengaruh dalam menentukan status kemiskinan. Usia kepala rumah tangga jika semakin tua, maka

kerentanan terhadap kemiskinan dapat terjadi. Hal ini disebabkan oleh penurunan kemampuan fisik dan meningkatnya biaya perawatan kesehatan yang sering dialami oleh individu yang lebih tua (Zhang et al., 2024). Erik Erikson (1950) berpendapat bahwa seiring bertambahnya usia, individu mungkin mengalami penurunan dalam produktivitas dan kesehatan, yang dapat berkontribusi pada peningkatan risiko kemiskinan. Kepala rumah tangga yang lebih tua sering kali menghadapi kesulitan dalam mempertahankan pekerjaan atau mendapatkan penghasilan yang memadai, akibat penurunan kemampuan fisik dan mental seiring dengan bertambahnya usia Bloom, D. E., Canning & Fink, G. (2010).

2.1.6 Teori Jenis Kelamin

Jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis antara pria dan wanita, termasuk kromosom, hormon, dan struktur reproduktif. Konsep ini sering dibedakan dari gender, yang lebih terkait dengan peran sosial dan identitas yang dibentuk oleh masyarakat (John Money dan Anke Ehrhardt, 1972). Mereka mengatakan bahwa pengaruh sosial dan lingkungan memainkan peran dalam pembentukan identitas gender. Mereka berpendapat bahwa identitas gender seseorang dibentuk sebagian besar oleh peran gender yang diberikan kepada mereka sejak lahir. Peran sosial dan norma budaya mempengaruhi bagaimana seseorang mengidentifikasi diri sebagai laki-laki atau perempuan, menurut teori mereka.

Naila Kabeer (1994) berpendapat bahwa ketidaksetaraan gender memainkan peran penting dalam mempengaruhi status kemiskinan, karena perempuan sering menghadapi hambatan struktural yang

menghalangi akses mereka terhadap sumber daya finansial, pendidikan, dan pekerjaan yang layak. Kabeer menunjukkan dalam bukunya yang berjudul "Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought" (1994) bahwa ketidaksetaraan gender dalam akses ke sumber daya seperti pendidikan dan layanan kesehatan menghalangi perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Perempuan yang kurang terdidik dan memiliki akses terbatas ke pekerjaan juga cenderung mengalami kemiskinan yang lebih tinggi, menggarisbawahi pentingnya mengatasi ketidaksetaraan gender untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

2.1.7 Teori Pendidikan

UNESCO (2015) mendefinisikan pendidikan sebagai proses formal atau informal yang melibatkan pemberian pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap kepada orang melalui pengajaran, pelatihan, atau pengalaman. Lev Vygotsky (1978) menekankan bahwa interaksi sosial dan pengalaman belajar yang aktif sangat penting untuk pembentukan pengetahuan. Pendekatan konstruktivisme dalam pendidikan dapat sangat membantu orang-orang dari keluarga miskin karena dapat meningkatkan peluang ekonomi mereka dengan mengajarkan keterampilan sosial dan kognitif yang penting. Siswa akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi dan pasar kerja jika lingkungan belajar mereka mendukung.

Wright (2007) mengemukakan bahwa peningkatan tingkat pendidikan kepala rumah tangga secara signifikan meningkatkan potensi pendapatan mereka. Kepala rumah tangga yang lebih terdidik cenderung

memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik, yang memungkinkan mereka memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan lebih stabil dengan gaji yang lebih tinggi. Studi ini juga menemukan bahwa keluarga dengan kepala rumah tangga yang terdidik lebih kecil kemungkinannya Pendidikan tidak hanya meningkatkan pendapatan seseorang tetapi juga mengurangi kemungkinan kemiskinan jangka panjang karena memberikan peluang kerja yang lebih baik.

2.1.8 Status Pekerjaan

Status pekerjaan menunjukkan jenis pekerjaan yang dapat mempengaruhi pendapatan dari individu maupun rumah tangga. Ada dua jenis status pekerjaan: bekerja dan tidak bekerja. Selanjutnya, bekerja dibagi menjadi bekerja di sektor formal dan informal (Wodon et al., 2017). Richard Freeman (1995) mengidentifikasi perbedaan dalam status pekerjaan dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja di Amerika Serikat lebih fleksibel dengan lebih banyak jenis pekerjaan sementara dan paruh waktu, sementara di Jerman, pasar tenaga kerja lebih terstruktur dengan lebih banyak pekerjaan tetap dan kontrak jangka panjang. Kualitas pekerjaan yang lebih tinggi di Jerman, seperti pekerjaan tetap dengan manfaat sosial yang lebih baik, berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan pekerja. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa di Amerika Serikat, meskipun terdapat banyak peluang kerja, pekerjaan sering kali kurang stabil dan berpenghasilan rendah dibandingkan dengan pekerjaan di Jerman yang lebih stabil dan bergaji lebih tinggi, yang membantu mengurangi risiko kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Menurut Badan Pusat Statistik, keadaan tidak bekerja merujuk pada situasi di mana seseorang tidak terlibat dalam aktivitas yang menghasilkan pendapatan atau gaji. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, seperti pengangguran, ketidakaktifan dalam mencari pekerjaan, atau kurangnya kesempatan untuk bekerja. Dampak dari tidak bekerja bisa sangat bervariasi, termasuk kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, ketergantungan pada orang lain, serta penurunan dalam kesejahteraan sosial dan ekonomi. Selain itu, tidak bekerja juga dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional seseorang, di mana mereka mungkin mengalami stres, kecemasan, dan rasa rendah diri akibat merasa tidak produktif atau tidak berguna bagi masyarakat.

2.1.9 Anggota Rumah Tangga

Jumlah anggota rumah tangga mencakup semua orang yang tinggal di rumah yang sama, terlepas dari hubungan keluarga. Ini bisa termasuk anggota keluarga inti seperti pasangan dan anak-anak, serta anggota keluarga seperti kakek-nenek, paman, bibi, atau teman serumah. BPS mengemukakan bahwa Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya tinggal di suatu rumah tangga, baik yang ada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang tidak ada. Anggota rumah tangga yang telah bepergian selama enam bulan atau lebih dan anggota rumah tangga yang telah bepergian tetapi berencana untuk pindah atau meninggalkan rumah selama enam bulan atau lebih tidak dianggap sebagai anggota rumah tangga.

Ukuran anggota rumah tangga mempengaruhi pengelolaan sumber daya dan kebutuhan ekonomi. Dimana rumah tangga dengan lebih dari satu anggota sering menghadapi masalah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi karena pendapatan yang terbatas harus dibagi di antara lebih banyak orang (*Blundell et al., 1999*). penelitiannya mengkaji efek beban rumah tangga besar, menyoroti bahwa pendapatan yang tidak memadai dapat meningkatkan risiko kemiskinan, terutama jika rumah tangga tidak dapat mengelola sumber daya secara efektif. Studi ini menunjukkan bagaimana ukuran rumah tangga dapat mempengaruhi distribusi sumber daya dan kesejahteraan ekonomi, serta bagaimana anggota rumah tangga yang lebih besar dapat berkontribusi pada tantangan ekonomi dan ketidaksetaraan.

2.1.10 Kepemilikan Tabungan

Menurut BPS kepemilikan tabungan merupakan kondisi di mana individu atau rumah tangga memiliki rekening tabungan di lembaga keuangan resmi. Michael S. Barr dan Susan M. Wachter (2005) menyatakan bahwa tabungan dan dana darurat sangat penting untuk perlindungan individu dan rumah tangga. Mereka menekankan bahwa memiliki tabungan yang memadai memungkinkan individu dan keluarga untuk menghadapi keadaan darurat seperti kehilangan pekerjaan, penyakit, atau bencana alam tanpa bergantung pada utang atau bantuan sosial.

Annamaria Lusardi (2010) menjelaskan bagaimana tabungan berperan dalam menjaga kestabilan keuangan seseorang dan rumah

tangga pada tahun. Menurut Lusardi, tabungan sangat penting untuk menghadapi berbagai situasi darurat dan ketidakpastian ekonomi. Dengan memiliki tabungan, orang dan rumah tangga dapat mengelola keadaan darurat finansial tanpa bergantung pada sumber daya eksternal seperti bantuan sosial atau utang, yang seringkali datang dengan biaya atau syarat yang signifikan. Lusardi menekankan bahwa akumulasi kekayaan dan tabungan yang cukup tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan tetapi juga melindungi dari kemiskinan, terutama dalam situasi finansial yang tidak menentu atau krisis.

2.2 Hubungan antar Variabel

2.2.1 Hubungan antara Umur Kepala Rumah Tangga Terhadap Status Kemiskinan

Umur tidak hanya selalu berkaitan dengan indikator waktu, melainkan juga mencerminkan perkembangan fisik, mental, emosional individu. Seiring bertambahnya umur, individu memiliki kesempatan untuk mengalami berbagai situasi hidup, belajar dari pengalaman dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin matang umur dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas, meskipun diakui bahwa ada penurunan produktivitas seiring bertambahnya umur.

Umur merupakan salah satu karakteristik rumah tangga dari segi demografi, dimana umur KRT dapat mencerminkan berbagai aspek yang dapat berpotensi mempengaruhi status kemiskinan rumah tangga. Bokosi (2007) menjelaskan bahwa hubungan antara umur KRT

terhadap kemiskinan berpengaruh positif, dimana secara teoritis umur akan mengalami proses penuaan yang dapat mempengaruhi kemampuan dalam meningkatkan perekonomian rumah tangga. Semakin meningkat umur seseorang, maka akan mempengaruhi produktivitas kerja, disisi lain terjadi peningkatan kebutuhan kesehatan.

2.2.2 Hubungan antara Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga Terhadap Status Kemiskinan

Menurut moghadam (2005) perempuan rentan terhadap kemiskinan karena mereka sering mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak, upah yang diterima cenderung rendah, dan tingkat pendidikan yang kurang memadai dan tingginya buta huruf. Aminah (2016) menyatakan bahwa pembagian peran antara laki-laki dan wanita dapat bervariasi antara satu masyarakat dan masyarakat lainnya, tergantung pada konteks lingkungan. Peran gender juga dapat mengalami perubahan seiring waktu, dipengaruhi oleh kemajuan bidang pendidikan, teknologi, ekonomi, dan faktor lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh sedefoglu dan Akay (2016) mengemukakan bahwa jenis kelamin memiliki keterkaitan terhadap kemiskinan rumah tangga, dimana jenis kelamin KRT memiliki peluang lebih tinggi untuk miskin dibanding dengan laki-laki.

2.2.3 Hubungan antara Pendidikan Kepala Rumah Tangga Terhadap Kemiskinan

Keterkaitan antara kemiskinan dan pendidikan sangat erat karena pendidikan memberikan pemahaman dan kemampuan untuk tumbuh melalui penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga

menciptakan kesadaran akan pentingnya martabat. Proses mendidik dan menyampaikan pengetahuan merupakan langkah untuk meraih masa depan, dan hal ini seharusnya menjadi motivasi untuk terus berupaya meningkatkan Status pendidikan di seluruh bangsa (Chriswardani Suryawati, 2005).

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008) menemukan bahwa pendidikan yang diukur melalui jumlah penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan SMP, SMA dan Diploma, memiliki pengaruh besar dan signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Temuan ini mencerminkan bahwa pembangunan modal melalui pendidikan merupakan faktor kunci untuk mengurangi angka kemiskinan.

2.2.4 Hubungan antara Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga Terhadap Status Kemiskinan

Pekerjaan yang menjadi kegiatan utama dalam suatu rumah tangga tersebut, sekaligus mempengaruhi besarnya pendapatan dan pengeluaran yang diterima oleh rumah tangga tersebut. Pekerjaan utama yang dimiliki oleh kepala rumah tangga memiliki dampak yang signifikan terhadap kemiskinan, karena setiap sektor pekerjaan menawarkan upah yang berbeda. Sektor pertambangan merupakan sektor basis di beberapa wilayah, masyarakat di sekitar area pertambangan mengalami perubahan yang disebabkan oleh adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Permintaan terhadap tenaga kerja menjadi salah satu faktor masyarakat yang awalnya hanya bekerja di sektor pertanian beralih bekerja di sektor industri, membuka

lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan. Pada umumnya, kepala rumah tangga yang memiliki pekerjaan memberikan kontribusi pendapatan dan akan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Kepala Rumah tangga yang tidak bekerja akan memperburuk kemiskinan di kalangan rumah tangga. Pengeluaran Kepala rumah tangga yang bekerja sebagai buruh/karyawan di bidang pendidikan sebesar 147,9 persen, sedangkan pengeluaran kesehatan lebih rendah 27,7 persen jika dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang tidak bekerja. Pemberi kerja pada sektor informal memiliki pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan yang 138,2 persen lebih rendah dan pengeluaran kesehatan yang 49,0 persen lebih rendah dibandingkan dengan kepala rumah tangga tidak bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa kepala rumah tangga yang tidak bekerja memiliki pendapatan di luar gaji atau upah non-labor income, sehingga mampu mengalokasikan sebagian besar pengeluaran rumah tangganya untuk pendidikan dan kesehatan (Fitryani, 2015). Kondisi ini mencerminkan bagaimana pekerjaan dapat berperan dalam mempengaruhi pengeluaran rumah tangga, yang akan berpengaruh taraf hidup dan kemungkinan keluar dari lingkaran kemiskinan.

2.2.5 Hubungan antara Jumlah Anggota Rumah Tangga Terhadap Status Kemiskinan

Jumlah anggota rumah tangga menjadi faktor yang menentukan tingkat kebutuhan ekonomi suatu rumah tangga. Semakin banyak anggota rumah tangga, maka semakin besar pula kebutuhan harian yang harus dipenuhi. Sebaliknya, rumah tangga dengan

anggota yang sedikit cenderung memiliki kebutuhan yang lebih terbatas. Kondisi ini berdampak pada beban finansial, terutama pada rumah tangga yang besar, yang cenderung memiliki lebih banyak anggota dan memerlukan pengeluaran lebih besar. Hubungan ini akan berdampak pada kondisi kemiskinan rumah tangga, terutama ketika kebutuhan meningkat namun ketersediaan sumber daya yang terbatas.

Menurut Sukirno (2000) perkembangan jumlah anggota keluarga dapat memiliki dampak positif dan negatif terhadap pembangunan. Dalam aspek positif, pertumbuhan ini dapat menjadi pendorong pembangunan, dimana tersedia tenaga kerja. Selain itu, perkembangan anggota rumah tangga dapat memperluas pasar barang dan jasa yang akan mempengaruhi pendapatan. Disisi lain, perkembangan anggota rumah tangga dapat menjadi penghambat pembangunan karena dapat menurunkan produktivitas dan menyebabkan peningkatan pengangguran. Hal ini berdampak pada kondisi kemiskinan, dimana perkembangan jumlah populasi yang tidak seimbang dapat menjadi tantangan dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan. Jumlah anggota rumah tangga akan mempengaruhi tingkat kemiskinan dalam rumah tangga. Semakin banyak anggota rumah tangga, akan semakin besar pula beban tanggungan ekonomi.

2.2.6 Hubungan antara Kepemilikan Tabungan Terhadap Status Kemiskinan

Menabung merupakan cara untuk meningkatkan standar hidup keluarga dan menyiapkan kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Tujuan menabung beragam, seperti untuk berjaga-jaga dalam keadaan darurat, menambah aset atau untuk kepuasan konsumsi di masa depan. Tabungan sebagai sarana untuk meningkatkan aset berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, seperti 1) meningkatkan stabilitas keluarga; 2) menumbuhkan orientasi kognitif dan emosional masa depan; 3) mendorong peningkatan human capital dan aset lainnya; 4) meningkatkan pengaruh sosial; 5) meningkatkan keamanan finansial; 6) meningkatkan kesejahteraan anak (Sherraden, 2006).

Kepemilikan tabungan dapat membantu rumah tangga dalam menghadapi krisis dan mengurangi kemiskinan, hal ini memungkinkan tabungan digunakan oleh kepala rumah tangga sebagai investasi maupun sumber pendapatan yang stabil dan membantu dalam mengatasi krisis keuangan. Selain itu, memiliki tabungan juga dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga secara material dan non material karena membantu dalam meningkatkan kualitas hidup tiap anggota rumah tangga, entah melalui pelatihan, pendidikan dan sebagainya.

2.3 Penelitian Terdahulu

Temuan yang dikemukakan oleh zhang dkk (2024) mengemukakan bahwa usia KRT yang lebih tua cenderung memiliki peluang kemiskinan yang lebih rendah karena memiliki pengalaman lebih kerja lama. Namun, setelah mencapai usia tertentu, peluang kemiskinan meningkat karena adanya penurunan produktifitas. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nike Roso

Wulandari (2016), menunjukkan bahwa umur KRT kurang dari atau sama dengan 60 tahun maka memiliki peluang kemiskinan cenderung akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan umur kepala rumah tangga diatas 60 tahun di kota kendari. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Sedefuglo & Akay (2016), dan Sugiharti & Rini (2016) justru mengungkapkan bahwa umur KRT berpengaruh positif terhadap status kemiskinan rumah tangga. Hal ini mengidentifikasi bahwa dengan meningkatnya umur dari kepala rumah tangga akan meningkatkan pendapatan sehingga dapat menopang perekonomian dari keluarga itu sendiri.

Ichsan & dewi (2018) mengemukakan bahwa pendidikan kepala rumah tangga dengan jenjang pendidan tertinggi yang ditamantkan memiliki peluang lebih kecil dibandingkan kepala rumah tangga dengan pendidikan rendah. Memiliki marginal effect sebesar -0,004 yang berarti jika pendidikan bertambah satu satuan maka kemungkinan terjadinya kemiskinan akan menurun sebesar 0,004. Sama hal dengan temuan yang dikemukakan oleh zheng dkk (2024) Rumah tangga yang dikepalai oleh individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap kemiskinan. Pendidikan yang lebih tinggi berkontribusi pada peningkatan keterampilan dan peluang kerja, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan mengurangi risiko jatuh ke dalam kemiskinan.

Sedefoglu & Akay (2016) melakukan penelitian mengenai kemiskinan di Turki yang menggunakan data Household Budget Survey, menunjukkan bahwa jenis kelamin KRT memiliki dampak signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga. Rumah tangga yang dikepalai oleh Perempuan memiliki peluang lebih tinggi untuk jatuh kedalam kemiskinan

dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki. Hal sebaliknya yang ditunjukkan oleh Rini & Sugiharti (2016) jika kemiskinan dipengaruhi secara positif jika KRT berjenis kelamin perempuan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rini & Sugiharti (2016) mengenai faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia, dimana berdasarkan hasil regresi logit gender, Variabel bekerja yang digunakan menunjukkan arah yang negatif. Ini berarti rumah tangga di mana seorang kepala rumah tangga bekerja memiliki kemungkinan lebih rendah berstatus miskin daripada rumah tangga di mana kepala rumah tangga tidak bekerja. Kemungkinan tersebut adalah 0,822 kali lebih rendah, menurut hasil regresi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sekhampu (2013), yang juga menemukan bahwa ada hubungan negatif antara status pekerjaan dan kemiskinan. Berbeda dengan variabel status pekerjaan, variabel pendidikan menunjukkan arah yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga dengan kepala rumah tangga berpendidikan rendah memiliki kemungkinan 1,371 kali lebih tinggi daripada rumah tangga dengan kepala rumah tangga berpendidikan menengah ke atas, menunjukkan bahwa pendidikan kepala rumah tangga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap status miskin keluarga. Selain itu, Penelitian yang dilakukan Yohana & Jeffry (2022), menunjukkan bahwa status pekerjaan KRT signifikan mempengaruhi kemiskinan rumah tangga yang bekerja di pulau Jawa.

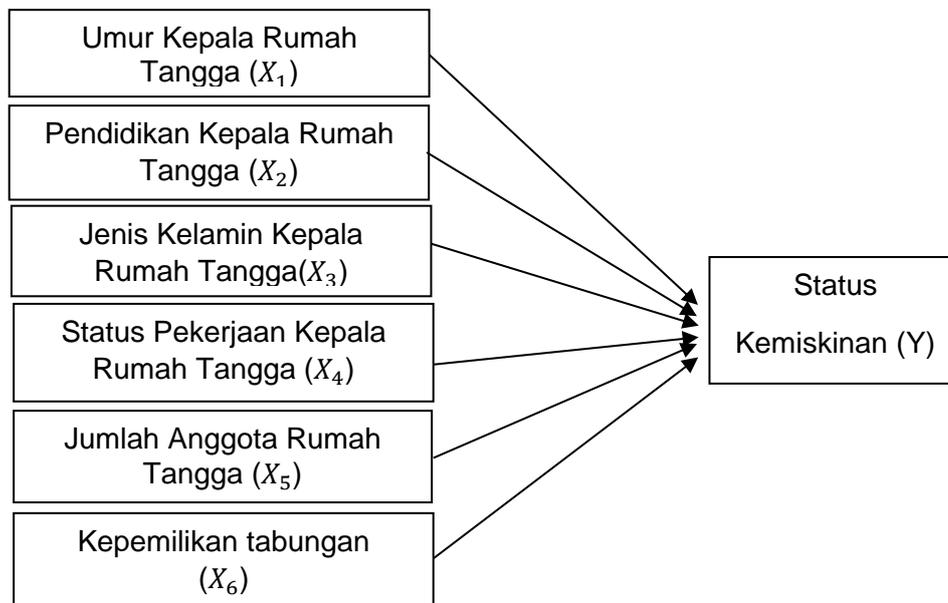
Penelitian yang dilakukan oleh Qhory & Lia (2017) mengenai determinan kemiskinan rumah tangga bekerja di perkotaan dan perdesaan provinsi NTB tahun 2017, mengemukakan bahwa kepemilikan tabungan signifikan dan berpengaruh positif terhadap kemiskinan rumah tangga.

Kemudian dijelaskan bahwa di wilayah perkotaan kepala rumah tangga yang tidak memiliki tabungan cenderung menjadi miskin sebesar 3,024 kali dibandingkan rumah tangga yang memiliki tabungan. di wilayah pedesaan, kepala rumah tangga yang tidak memiliki tabungan lebih cenderung menjadi miskin sebesar 2,087 lebih besar dibanding kepala rumah tangga yang memiliki tabungan.

2.4 Kerangka Konseptual

Kemiskinan tidak hanya bersumber dari faktor ekonomi semata, tetapi juga berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Beberapa karakteristik rumah tangga dapat mempengaruhi status kemiskinan, diantaranya umur kepala rumah tangga, dimana perubahan umur yang terus meningkat dalam suatu rumah tangga dapat memberikan pengaruh terhadap risiko kemiskinan. Selain itu, pendidikan akan mempengaruhi kemiskinan, dimana pendidikan rendah cenderung menghadapi kendala dalam mengelola sumber daya alam secara optimal, dengan kurangnya pendidikan akan berkontribusi pada ketidakmampuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

Jenis pekerjaan dan kepemilikan tabungan merupakan karakteristik rumah tangga yang dapat mempengaruhi terhadap penghasilan dan kesejahteraan ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, peran dari kepala rumah tangga perempuan yang akan berdampak positif atau negatif terhadap status kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi status kemiskinan dalam rumah tangga.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesis

Berdasarkan teori dan kerangka konseptual yang telah dijabarkan sebelumnya, maka hipotesis yang akan dimunculkan adalah sebagai berikut:

1. Diduga terdapat pengaruh umur kepala rumah tangga terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Luwu Timur.
2. Diduga terdapat pengaruh pendidikan kepala rumah tangga terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Luwu Timur.

3. Diduga terdapat perbedaan pengaruh jenis kelamin kepala rumah tangga terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Luwu Timur.
4. Diduga terdapat perbedaan pengaruh status pekerjaan kepala rumah tangga terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Luwu Timur.
5. Diduga jumlah anggota rumah tangga berpengaruh terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Luwu Timur.
6. Diduga terdapat perbedaan pengaruh kepemilikan tabungan terhadap status kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Luwu Timur.